

KATA PENGANTAR

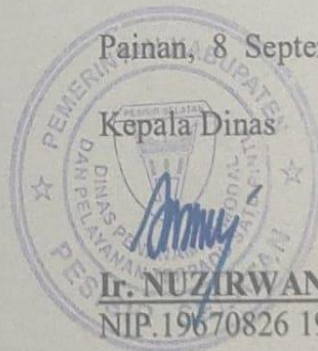
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa akhirnya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja Urusan Penanaman Modal dan PTSP secara cepat, efisien dan terpadu. Masukan dan saran sangat terbuka guna menunjang kesempurnaan RKT PD ini.

Kami ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

Painan, 8 September 2025

Kepala Dinas



Ir. NUZIRWAN N.M.T

NIP.19670826 1998031 001

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdayasaing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkat PD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dinamakan Rencana Kerja Tahunan (RKT) PD, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) PD ini menterjemahkan perencanaan strategis lima tahun yang dituangkan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Tahunan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra PD yang menjadisatu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Kualitas dokumen RKT sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan RKT PD sangat ditentukan oleh kemampuan PD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-2850 Tahun 2025 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sedangkan untuk prioritas program dan kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman teknis dan strategis dalam penyelenggaraan urusan Penanaman Modal dan PTSP selama 1 (satu) tahun ke depan.

Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA AOP TAHUN 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2										
2	18									
2	18	01								
2	18	01	2.02							

2	18	01	2.02	01	PenyediaanAdministrasi PelaksanaanTugasASN	Jumlah dokumen hasilpenyediaanadminist rasi pelaksanaantugasASN	12bulan	78.097.114	100%	67.616.444	98,36	100%	47,44%	100%
2	18	01	2.02	02	KegiatanPerencanaan,pengang garandanevaluasikinerja perangkat daerah	Meningkatnya kualitasperncanaanterlak sananyaevaluasikinerjap erangkatdaerah	12 bulan	29.567.917	100%	32.166.850	98,68	100%	39,94%	100%
2	18	01	2.06		Sub Kegiatan									
2	18	01	2.06	01	EvaluasiKinerjaPerangkatDae rah	Jumlahlaporanevaluasiki nerjaperangkatdaerah	12 bulan	29.567.917	100%	32.166.850	98,68	100%	39,94%	100%
2	18	01	2.06	04	KegiatanAdministrasiUmumP erangkatDaerah	Persentaseketercapaian penunjangperangkat daerah		396.317.057	100%	329.673.923	97,36	100%	42,21%	100%
2	18	01	2.06	05	Sub Kegiatan									
2	18	01	2.06	06	PenyediaanKomponenInstal asiListrik/PeneranganBang unanKantor	JumlahpaketkomponenI nstalasilistrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	12.898.323	100%	11.849.465	99,89	100%	56,79%	0
2	18	01	2.06	08	PenyediaanPeralatandanperle ngkapankantor	Jumlah paket peralatanandanperlengkap ankantor yangdisediakan	12 bulan	58.920.485	100%	15.500.000	96,23	100%	0%	100%
2	18	01	2.06	09	PenyediaanBahanLogistikkant or	Jumlahpaketbahan logistikkantoryangdisedi akan	12 bulan	27.445.943	100%	23.668.800	99,98	100%	23,91%	100%
2	18	01	2.07		PenyediaanBarangCetakanda nPenggandaan	Jumlahpaketbarangcetak andan penggandaanyang disediakan	12 Bulan	18.324.328	100%	19.436.880	91,17	100%	47,74%	100%
2	18	01	2.07	06	PenyediaanBahanBacaanda nPeraturanPerundang- undangan	Jumlahdokumenbahanb acaan dan peraturanperundang- undangan yangdisediakan	2 buah	5.400.000	100%	3.960.000	73,33	100%	37,50%	100%
2	18	01	2.08		FasilitasiKunjunganTamu	Jumlahlaporanfasilitasik unjungantamu	12 bulan	8.206.000	100%	6.784.800	100	100%	12,59%	100%
2	18	01	2.08	02	PenyelenggaraanRapatKoordi nasidanKonsultasiSKPD	Jumlahlaporanpenyeleng garaan koordinasidan konsultasi	12 Bulan	265.121.978	100%	248.473.978	98,03	100%	46,72%	100%

2	18	01	2.08	04	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		288.450.590	100%	275.203.765	90,86	100%	39,81%	100%
2	18	01	2.09		Sub Kegiatan									
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 bulan	80.856.139	100%	100.013.033	93,83	100%	40,73%	100%
2	18	01	2.09	11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 bulan	207.594.451	100%	175.190.732	89,24	100%	39,33%	100%
2	18	02			Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		-	100%	-	-	100%	-	0
2	18	02	2.01		Sub Kegiatan									
2	18	02	2.01	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	-	-	100%	-	-	-	-	0
2	18	02	2.01	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	-	100%	7.820.000	96,51	-	-	0
2	18	02	2.01	06	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	85.083.558	100%	108.396.850	98,06	100%	35,02%	100%
2	18	02	2.01	12	Sub Kegiatan									
2	18	03			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 Bulan	73.660.089	100%	80.300.000	97,40	100%	34,24%	100%
2	18	03	2.02		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 bulan	11.423.469	100%	28.096.350	99,99	100%	38,78%	100%
2	18	03	2.02	08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	-	-	100%	-	-	-	-	0

	PenyusunanStrategiPromosiPenanamanModal	JumlahCalonInvestorYangDifasilitasi	1	1.131.090	100%	-	-	5pernyataanminat	-	0
	PelaksanaanKegiatanPromosiPenanaman Modal DaerahKabupaten/Kota	JumlahPernyaan Minat	5	103.692.400	100%	-	-	1 x promosi	-	0
	PROG. PelayananPenanamanModal	Persentaseizinyangditerbitkan	70 %	109.530.536	100%	100.575.710	99,41	100%	36,68%	100%
	PelayananPerizinandanNonPerizinansecaraterpadusatupintudibidang PenanamanModal yang menjadi KewenanganDaerah Kabupaten / Kota	Jumlahpelakuusahayangmendapatkanlayanan	4.250	109.530.536	100%	100.575.710	99,41	100%	45,88%	100%
	<i>Sub Kegiatan</i>									
	PenyediaanPelayananTerpaduPerizinan danNonperizinan berbasis SistemPelayananPerizinanBerusahaTerintegrasiSecaraElektronik	JumlahPelakuusahayangmendapatkanlayananterpaduperizinan dan nonperizinnanberbasis sistem pelayananperizinanberusahaaterintegrasisecara elektronik	4.250	61.661.456	100%	59.847.190	99,68	7.000	45,88%	100%
	PemantauanPemenuhanKomitmenPerizinandanNonPerizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usahadari pelaku usaha yangmendapatkanpemantauanpemenuhankomitmenperizinanberusaha dan nonperizinanPenanaman Modal	150 izin	22.422.650	100%	20.882.520	99,69	10 izin	14,99%	100%
	Penyediaanlayanankonsultasi dan pengelolaanpengaduanmasyarakatterhadapPelayananTerpaduPerizinandanNonPerizinan	Jumlah orang yangmemperoleh layananankonsultasidanterkelolanyapengaduanmasyrakatterhadapdapelayananterpaduperizinandannonperiznan	300 quisioner	25.446.430	100%	19.846.000	98,31	350 responden	-	0

	PROG. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Iklim Investasi dan realisasi PM	25 Pelaku usaha	309.995.213	100%	569.928.135	65,27	100%	12,65%	100%
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan usahadari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan PM	25 Pelaku usaha	309.995.213	100%	569.928.135	65,27	100%	12,65%	100%
	<i>Sub Kegiatan</i>									
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan PM	240 pelaku usaha	284.859.950	100%	770.000	0,62	-	-	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan PM	-	-	100%	401.978.200	87,96	-	-	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan yang sesuai SOP	30 Kegiatan usaha	25.135.263	100%	167.179.935	57,35	-	12,65%	100%
	PROG. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Peningkatan Pengelolaan Data Perizinan yang Terintegrasi	-	-	100%	15.462.650	99,71	-	-	0
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Perizinan Persektor	-	-	100%	15.562.650	99,71	-	-	0
	<i>Sub Kegiatan</i>									
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha	Laporan dan data perizinan	-	100%	15.562.650	99,71	-	-	0

Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran

indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024 dengan 5 (lima) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.4.718.392.580,- sampai dengan per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp.4.143.310.584,- atau 87,81% dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki 7 (tujuh) kegiatan yang terdiri dari 16 (enam belas) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.612.953.286,- dengan realisasi Rp.3.342.339.162,- persentase keuangan 92,51%, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa tersedianya pelaksanaan Administrasi Program Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun rincian kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah Kabupaten / Kota yaitu :

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp.32.595.705,- dengan realisasi Rp.32.168.850,- persentase keuangan 98,68%, keluarannya berupa Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.815.190.339,- dengan realisasi Rp. 2.588.477.774,- persentase keuangan 91,95%, keluarannya berupa terlaksananya administrasi keuangan ASN;

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp.338.626.430,- dengan realisasi Rp.329.673.923,- persentase keuangan 97,36%, keluarannya berupa tertib pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp.302.897.430,- dengan realisasi Rp.275.203.765,- persentase keuangan 90,86%, keluarannya berupa persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;

e) Kegiatan Pemilihan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp.110.540.382,- dengan realisasi Rp.108.396.850,- persentase keuangan 98,06%, keluarannya berupa persentase barang milik daerah yang berkondisi baik;

f) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dengan realisasi Rp.600.000,0 persentase keuangan sebesar 12%, keluarannya berupa terlaksananya pegawai yang melakukan bimbingan teknis implementasi perundang-undangan;

g) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp.8.103.000,- dengan realisasi Rp.7.820.000,- persentase keuangan 96,51%, keluarannya berupa persentase jumlah mebel yang disediakan.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini memiliki dua kegiatan dengan pagu anggaran Rp.115.578.858,- dengan realisasi Rp.115.004.927,- persentase keuangan sebesar 99,50%, keluaran berupa dokumen peraturan daerah.

Program ini mempunyai 2 (dua) kegiatan diantaranya adalah:

a) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 72.498.968,- dengan realisasi Rp.72.225.298,- persentase keuangan 99,62% keluarannya berupa dokumen peta potensi investasi.

- b) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp.43.079.890- dengan realisasi Rp.42.779.629,- persentase keuangan 99,30% keluarannya berupa dokumen peraturan daerah.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini memiliki pagu anggaran Rp.101.171.327,- dengan realisasi Rp.100.575.710,- persentase keuangan 99,41%, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/ keluarannya Penerbitan izin sesuai dengan SOP.

Adapun rincian kegiatan pada Program Pelayanan Penanaman Modal yaitu :

- a) Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 60.038.335,- dengan realisasi Rp.59.847.190,- persentase keuangan 99,68%, keluarannya jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Program ini memiliki pagu anggaran Rp.873.181.075,- dengan realisasi Rp.569.928.135,- persentase keuangan 65,27%, yang dananya bersumber

dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Fasilitas Penanaman Modal. Hasil/keluarannya berupa terlaksananya pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, terlaksananya pemantauan penanaman modal dan terlaksananya operasional penanaman modal.

Adapun kegiatan pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yaitu :

- a) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp.873.181.075,- dengan realisasi Rp.569.928.135,- persentase keuangan 65,27%, keluarannya berupa meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan meningkatnya realisasi penanaman modal.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk tahun berjalan yakni anggaran tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp.3.567.554.116,- yang terdiri dalam 6 (Enam) Program dan 11 (Sebelas) Kegiatan dengan 22 (Dua Puluh Dua) Sub Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%. Sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, Visi Kepala Daerah ditetapkan yaitu : **“PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN”**. Dalam rangka menjalankan visi, telah ditetapkan Misi, dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Misi 1 dan 3, yaitu :

Misi1. MewujudkanPemerintahanyangProfesionaldanBerintegritas

Misi3. PesisirSelatanMenjadiSentraPangandanDestinasiWisata

Unggul untukMewujudkan Masyarakat Sejahtera

Tabel2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi	
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2023	2024	2025	2026
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah			80	81	82	83	84	85	83,07	89,31	80	81
2.	Nilai Investasi UMK dan Non UMK			925.000 .000.000	925.000 .000.000	971.250 .000.000	1.070.803 .125.000	1.124.343 .281.250	1.180.560 .445.313	918.741.364. 117	907.066.439. 129	925.000 .000.000	925.000 .000.000
3.	Nilai Pelayanan Publik			90,54	91	91,5	92	92	92	82,55	90,54	90,54	91
4.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah			95	97	97	97	97	97	95	95	95	97

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi;
2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
3. Belum optimalnya koordinasi;
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini

Tabel 2.3
Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesisir Selatan

KODE			URUSAN/BIDANGURUSANPEMERINTAHDAERAHDANPR OGRAM/KEGIATAN	INDIKATORKINERJAPROGRAM/KEGIATAN	RENCANATAHUN2025				CATATAN PENTING	PERKIRAANMAJUR ENCANATAHUN2026	
					LOKASI		KEBUTUHAN DANA/PAGUI NDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1			2	3	4		6	7	8	9	10
1			ProgramPenunjangUrusanPemerintahanDaerahKabupaten/Kota	Persentaseketercapaianpenunjangurusanperangkat daerah dengan tersedianyaAdministrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100 %	3.292.367.328	APBD		100 %	3.999.657.550
		1	KegiatanAdministrasiKeuanganPerangkatDaerah	JumlahorangyangmenerimaajidantunjanganASN		14bulan/orang	2.653.194.669	APBD		14bulan/orang	3.030.000.000
			Sub Kegiatan								
		1	PenyediaanGajidanTunjanganASN	JumlahorangyangmenerimaajidantunjanganASN	IV Jurai	14bulan/orang	2.588.052.354	APBD	Rutinitas	14bulan/orang	2.970.000.000
		2	PenyediaanAdministrasi PelaksanaanTugasASN	Jumlah dokumen hasil penyediaanadministrasipelaksanaantugasASN	IV Jurai	1 dokumen	65.142.315	APBD	Rutinitas	12 dokumen	60.000.000
		2	KegiatanPerencanaan,Penganggaran danEvaluasiKinerjaPerangkatDaerah	Jumlah dokumen hasil penyediaanadministrasipelaksanaantugasASN		15 laporan	17.499.708	APBD	Rutinitas	12 laporan	12.857.550
			Sub Kegiatan								

		3		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Pessel	-	-	-		12 laporan	1.000.000
		4		<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah laporan kinerja evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Pessel	15 laporan	17.499.708	APBD	Rutinitas	24 laporan	10.000.000
		5		<i>Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah</i>	Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	Kab. Pessel	-	-	-	-	2 data	1.857.550
	3			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Keuangan perangkat daerah		1 paket	227.145.401	APBD	Rutinitas	1 paket	325.000.000
				<i>Sub Kegiatan</i>								
		6		<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	IV Jurai	1 paket	10.615.889	APBD	Rutinitas	12 paket	12.000.000
		7		<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan</i>	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	IV Jurai	1 paket	8.136.630	APBD	Rutinitas	12 paket	30.000.000
		8		<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	IV Jurai	1 paket	21.175.549	APBD	Rutinitas	12 paket	23.000.000
		9		<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan;	Kab. Pessel	1 paket	10.104.833	APBD	Rutinitas	12 paket	25.000.000

		1 0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan;	Kab. Pessel	3 dokumen	3.600.000	APBD	Rutinitas	12 dokumen	7.500.000
		1 1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Kab. Pessel	1 paket	11.792.000	APBD	Rutinitas	12 laporan	7.500.000
		1 2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Pessel	12 laporan	161.720.500	APBD	Rutinitas	12 laporan	200.000.000
	4		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pessel		289.937.168	APBD	Rutinitas	12 laporan	335.000.000
			Sub Kegiatan								
		1 3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pessel	12 laporan	102.000.000	APBD	Rutinitas	12 laporan	145.000.000
		1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	Kab. Pessel	12 laporan	187.937.168	APBD	Rutinitas	12 laporan	190.000.000
	5		Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		-	-				20.000.000
			Sub Kegiatan								
		1 5	Pengadaan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah unit Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kab. Pessel	-	-	-	-	-	0
		1 6	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Pessel	-	-	-	-	-	20.000.000
	6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	Kab. Pessel		99.590.382	APBD	Rutinitas	12 laporan	165.000.000
			Sub Kegiatan								

		17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Pessel	1 unit	39.190.000	APBD	Rutinitas	1 unit	45.000.000
		18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Pessel	1 unit	34.100.000	APBD	Rutinitas	1 unit	50.000.000
		19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Pessel	6 unit	17.150.000	APBD	Rutinitas	10 unit	20.000.000
		20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Kab. Pessel	-	-	-	-	-	50.000.000
	7		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pessel	2 Orang	-	APBD	Rutinitas		111.800.000
			Sub Kegiatan								
		21	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kab. Pessel	-	-	APBD	Rutinitas	1 paket	19.800.000
		22	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kab. Pessel	-	-	APBD	Rutinitas	1 dokumen	17.000.000
		23	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Pessel	-	-	APBD	Rutinitas	5 orang	50.000.000

		24		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Pessel	-	-	APBD	Rutinitas	1 orang	25.000.000
2				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah/Provinsi dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan PM	Kab. Pessel	1 dokumen	36.352.250	APBD		1 dokumen	277.000.000
	8			Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan daerah/Provinsi dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan PM	Kab. Pessel	1 dokumen	36.352.250	APBD	-	1 dokumen	87.000.000
				<i>Sub Kegiatan</i>								
		25		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah/Provinsi dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan PM	Kab. Pessel	1 dokumen	36.352.250	APBD	-	1 dokumen	32.000.000
		26		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah	Kab. Pessel	-	-	APBD	-	1 dokumen	30.000.000
		27		Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya diharmonisasikan terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasikan terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Pessel	-	-	APBD	-	1 dokumen	25.000.000
	9			Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Jumlah peta potensi yang diterbitkan	Kab. Pessel	1 dokumen	-	APBD	-	1 dokumen	190.000.000
				<i>Sub Kegiatan</i>								

		28	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	1 dokumen	-	APBD	-	1 dokumen	100.000.000
		29	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Daerah yang telah Dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi	Kab. Pessel	1 dokumen	-	APBD	-	1 dokumen	40.000.000
		30	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	1 dokumen	-	APBD	-	1 dokumen	50.000.000
3			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi yang Berinvestasi							
			Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kab. Pessel	1 dokumen	134.481.900	APBD	-	1 dokumen	275.000.000
			<i>Sub Kegiatan</i>								
		31	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	1 dokumen	134.481.900	APBD	-	1 dokumen	200.000.000
		32	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kab. Pessel	1 dokumen	-	APBD	-	1 dokumen	75.000.000
4			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan							
			Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Pessel	7000 pelaku usaha	76.052.848	APBD	-	12.797 pelaku usaha	242.500.000
			<i>Sub Kegiatan</i>								
		3	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan	Kab. Pessel	-	-	APBD	-	1 dokumen	25.000.000

		3		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota							
		3	4	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik	Kab. Pessel	7000 pelaku usaha	54.879.035	APBD	-	8000 pelaku usaha	150.000.000
		3	5	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Pessel	350 pelaku usaha	9.472.840	APBD	-	375 pelaku usaha	27.500.000
		3	6	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kab. Pessel	45 kegiatan usaha	11.700.973	APBD	-	50	40.000.000
5				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Kab. Pessel						
				Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha serta evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Kab. Pessel	250 pelaku usaha	23.296.950	APBD	-	250 pelaku usaha	800.000.000
				Sub Kegiatan								
		3	7	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Pessel	250 pelaku usaha	23.296.950	APBD	-	250 pelaku usaha	75.000.000

		3 8		<i>Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha</i>	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Pessel	250 pelaku usaha	23.296.950	APBD	-	400 pelaku usaha	450.000.000
		3 9		<i>Pengawasan Penanaman Modal</i>	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Pessel	250 usaha	23.296.950	APBD	-	75 usaha	275.000.000
6				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang di olah, di kaji dan dimanfaatkan.	Kab. Pessel						
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang di olah, di kaji dan dimanfaatkan.	Kab. Pessel	-	5.002.840	APBD	-	1 dokumen	15.000.000
				<i>Sub Kegiatan</i>								
		4 0		<i>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Pessel	-	5.002.840	APBD	-	1 dokumen	15.000.000
				Total				3.567.554.116				5.609.157.550

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan bagi kepentingan masyarakat masih sangat terbatas mengingat anggaran yang tersedia sangat minim padahal untuk menangani masalah penanaman modal dan perizinan merupakan tanggung jawab lintas sektor. Koordinasi lintas sektor lebih ditingkatkan agar program dan kegiatan dapat bersinergis sehingga mencapai sasaran yang terarah dan tepat

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

[illegible]

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tujuan dan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

a) Tujuan

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan dengan berpedoman kepada Visi dan Misi yang didasarkan pada analisis strategi lingkungan dengan konsisten kepada tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan dan program kegiatan. Dimana tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

- 1) Memperjelas arah tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dengan program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2) Memberikan transparansi kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3) Mengadakan evaluasi kegiatan.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan pengembangan investasi.

- 5) Meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran pelayanan umum yang dilakukan aparatur negara.

Tujuan, Sasaran dan Rencana Kerja DPMPTSP

Sasaran merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti tahunan atau semesteran. Sasaran strategis yang difokuskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan yaitu :

- 1) Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja
- 2) Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah
- 3) Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik
- 4) Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN

Program dan Kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

III. Program Promosi Penanaman Modal

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

BABIV

RENCANA KERJADAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Program-program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2026 mendukung prioritas pembangunan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Rencana Kerjadan Pendanaan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2		3	4	5	6
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	Kab Pessel	100%	3.999.657.550
	1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kab Pessel		3.030.000.000
		<i>Sub Kegiatan</i>				
	1	<i>Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN</i>	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab Pessel	14 orang /bulan	2.970.000.000
	2	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab Pessel	14 orang /bulan	144.569.398
	2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Pessel		12.857.550
		<i>Sub Kegiatan</i>				

		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pessel	12 laporan	1.000.000
		4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pessel	24 laporan	10.000.000
		5	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Pessel	2 laporan	1.857.550
	3		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pessel		111.800.000
			Sub Kegiatan				
		6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kab. Pessel	1 paket	19.800.000
		7	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kab. Pessel	1 dokumen	17.000.000
		8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Pessel	5 orang	50.000.000
		9	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Pessel	1 orang	25.000.000
	4		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Keuangan perangkat daerah	Kab. Pessel		
		10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Pessel	12 paket	12.000.000
		11	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Pessel	12 paket	30.000.000
		12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Pessel	12 paket	23.000.000
		13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan;	Kab. Pessel	12 paket	25.000.000

		1 4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan;	Kab Pessel	12 dokumen	7.500.000
		1 5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Kab. Pessel	12 laporan	7.500.000
		1 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pessel	12 laporan	200.000.000
		1 7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dinamis pada SKPD	Kab. Pessel	12 dokumen	20.000.000
	5		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Kab Pessel		
			Sub Kegiatan				
		1 8	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	Kab Pessel	1 unit	20.000.000
	6		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Pessel		
			Sub Kegiatan				
		1 9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Pessel	12 bulan	145.000.000
		2 0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	Kab Pessel	12 bulan	190.000.000
	7		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	Kab Pessel		
			Sub Kegiatan				
		2 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab Pessel	1 unit	45.000.000
		2 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Pessel	1 unit	50.000.000

			Operasional atau Lapangan				
		23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kab Pessel	20 unit	20.000.000
		24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab yang dipelihara)	Kab Pessel	1 unit	50.000.000
2			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab Pessel	100%	277.000.000
	8		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah peraturan daerah/Provinsi dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan PM	Kab Pessel		
			Sub Kegiatan				
		25	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah/Provinsi dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan PM	Kab Pessel	1 dokumen	32.000.000
		26	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMK di Daerah	Kab. Pessel	1 dokumen	30.000.000
		27	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya diharmonisasikan terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasikan terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Pessel	1 dokumen	25.000.000
	9		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Jumlah peta potensi yang diterbitkan	Kab. Pessel		
			Sub Kegiatan				
		28	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	1 dokumen	100.000.000
		29	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Daerah yang telah dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi	Kab. Pessel	1 daerah	40.000.000
		30	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Pessel	1 dokumen	50.000.000

3			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab Pessel	100%	275.000.000
	10		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kab Pessel		
			<i>Sub Kegiatan</i>				
		31	<i>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab Pessel	1 dokumen	200.000.000
		32	<i>Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kab. Pessel	1 dokumen	75.000.000
4			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usahayang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan	Kab Pessel	100%	242.500.000
	11		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab Pessel		
			<i>Sub Kegiatan</i>				
		33	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah</i>	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang Menjadi Kewenangan Kab/Kota	Kab. Pessel	1 dokumen	25.000.000
		34	<i>Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik	Kab Pessel	8.000 pelaku usaha	150.000.000
		35	<i>Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab Pessel	375 pelaku usaha	27.500.000
		36	<i>Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku	Kab Pessel	50 usaha	40.000.000

				Usaha			
5			ProgramPengendalianPelaksanaanPenanamanModal	PersentasePenyelesaianPermasalahandanHambatan yangdihadapiPelaku Usaha dalamMembukaUsaha	KabPessel	100%	800.000.000
	1 2		KegiatanPengendalianPelaksanaanPenanaman Modal yang menjadiKewenanganDaerahKabupaten / Kota	Terlaksananya analisa danverifikasi data, profil daninformasikegiatanusahadari pelaku usaha serta evaluasipenilaiankepatuhanpelaksanaanperizinanberusaha	KabPessel		800.000.000
			<i>Sub Kegiatan</i>				
		3 7	<i>PenyelesaianPermasalahandanHambatan yangdihadapiPelaku Usaha dalammerealisasikankegiatan Usahanya</i>	JumlahPenyelesaianPermasalahandanHambatan yangdihadapi Pelaku UsahadalammerealisasikanKegiatan Usaha nya	Kab. Pessel	2kegiatan usaha	75.000.000
		3 8	<i>BimbinganTeknis kepadaPelakuUsaha</i>	Jumlah Pelaku Usaha yangMengikuti BimbinganTeknis/SosialisasimplementasiPerizinanBerusahaBerbasisRisikodanPengawasanPerizinanBerusaha Berbasis Risiko	Kab. Pessel	400pelaku usaha	450.000.000
		3 9	<i>PengawasanPenanaman Modal</i>	Jumlah Kegiatan Usaha dariPelaku Usaha yang TelahDianalisa dan DiverifikasiData, Profil dan InformasiKegiatan Usaha dari PelakuDilakukanInspeksiLapangan;serta dilakukan EvaluasiPenilaianKepatuhanPelaksanaanPerizinanBerusaha	Kab. Pessel	75kegiatan usaha	275.000.000
6			ProgramPengelolaanData dan Sistem InformasiPenanamanModal	Jumlahdata daninformasiperizinandaninformasiperizinanberbasis sistem pelayananperizinanberusaha terintegrasisecaraelektronik yang di olah, dikaji dan di manfaatkan.	Kab.Pessel	100%	15.000.000

	1 3		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan.	Kab. Pessel		15.000.000
			<i>Sub Kegiatan</i>				
		4 0	<i>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Pessel	1 dokumen	15.000.000
			Total				5.609.157.550

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja sesuai urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna meningkatkan serta mengefektifkan Sistem dan Tata Laksana Pelayanan Perizinan dan Pengembangan Investasi di Bidang Penanaman Modal secara cepat dan efisien. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya penambahan dan perubahan yang membangun baik dalam Program Kerja, Kegiatan dan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur Perizinan. Mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang Program Rencana Kerja ini akan lebih sempurna seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan Rencana Kerja.

Akhirnya, dengan telah disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan semoga Renja ini dapat dijadikan acuan kerja khususnya bagi seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan umumnya bagi pihak-pihak terkait.